

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwaharja periode tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar periode tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan perda. Renstra Kecamatan Purwaharja disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Purwaharja dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Proses penyusunan rencana strategis kecamatan purwaharja mengacu pada RPJMD Kota Banjar dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang dilaksanakan di Kecamatan Purwaharja.

Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi yang ada, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi percepatan terwujudnya tujuan pembangunan di Kecamatan Purwaharja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Purwaharja menyusun Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan rencana Strategis Kecamatan Purwaharja Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
10. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

11. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
13. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
14. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
24. Peraturan Daerah Kota Banjar No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Kota Banjar No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033.
26. Peraturan Daerah Kota Banjar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar.
27. Peraturan Wali Kota Banjar No. 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan pemerintah Kota Banjar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Purwaharja Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut RENSTRA disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Kecamatan Purwaharja dalam melaksanakan program dan kegiatan serta

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwaharja adalah :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Purwaharja tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Purwaharja

Memuat informasi, tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan; sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Purwaharja.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Purwaharja

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Purwaharja dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kecamatan Purwaharja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Purwaharja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Purwaharja, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWAHARJA

Kecamatan Purwaharja berkedudukan sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Banjar yang mempunyai wilayah kerja di wilayah Kecamatan Purwaharja. Kecamatan Purwaharja dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjar. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan pemerintah Kota Banjar, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan, dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Purwaharja

2.1.1 Tugas Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Banjar, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana, terdiri atas :

- a. Kecamatan;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Kelurahan;

Susunan organisasi kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat

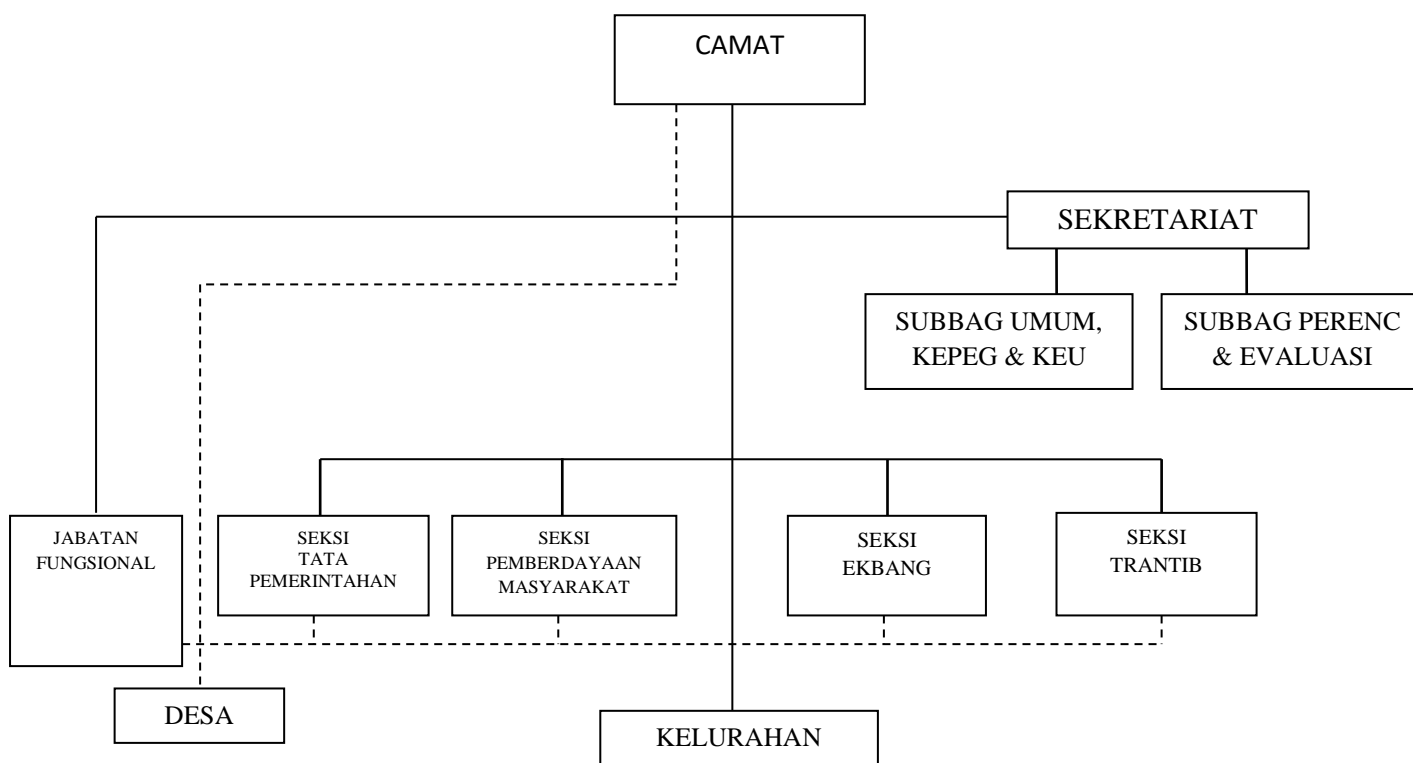
2.1.2 Fungsi Kecamatan

Kecamatan dalam menjalankan tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, pemeliharaan sarana dan pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebulan lain dan/ atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, pemeliharaan sarana dan pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebulan lain dan/ atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, pemeliharaan sarana dan pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebulan lain dan/ atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- e. Pembinaan aparatur sipil negara pada kecamatan dan kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berikut Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjar berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Banjar :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Purwaharja



2.2. Sumber Daya Kecamatan Purwaharja

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Purwaharja memiliki pegawai sebanyak 27 PNS dengan dibantu oleh 24 non PNS.

Secara lengkap rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Kecamatan Purwaharja

NO	NAMA	NIP	GOL. RUANG		JABATAN	KET
1	DRS. WAWAN HERNAWAN, M.Si	19660512 198603 1012	PEMBINA TK.I	IV/B	CAMAT	PNS
1	YOYO SUNARYO	19670701 1988031006	PENATA TK I	III/D	KA.SIE. TRANTIB	PNS
3	MULYADI	19630611 1989081006	PENATA TK 1	III/D	KA.SIE. PEMERINTAHAN	PNS
4	RAHMAT BARKAH, SE	19700911 200501 1011	PENATA TK.I	III/D	KA.SIE. EKBANG	PNS
5	RINA PURNAMA SARI, S.STP	19870831 200602 2001	PENATA	III/C	SEKRETARIS KECAMATAN	PNS
6	HERTI KARTIKAWATI, S.SOS.,M.AP	19850421 200902 2014	PENATA	III/C	KA.SIE.PMD	PNS

7	ANGGI SUSILO,S.HI	19780202 200701 1 009	PENATA	III/C	KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	PNS
8	DEDE SANTY MEI S,SE	19790517 200801 2 008	PENATA	III/C	KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI	PNS
9	EEN SUNARSIH	19650516 199003 2 005	PENATA MUDA	III/A	PELAKSANA KEPEGAWAIAN	PNS
10	MAMAT RAHMAT	19630414 199311 1 001	PENATA TK.I	II/D	PELAKSANA EKBANG	PNS
11	SUNARTI	19640207 200701 2 012	PENGATUR	II/C	PELAKSANA PMD	PNS
12	MASINO	19631014 200701 1 008	PENGATUR	II/C	PELAKSANA PEMERINTAHAN	PNS
13	MAMAN TARYAMAN	19760128 201001 1 003	PENGATUR	II/C	BENDAHARA BARANG	PNS
14	IRA HERAWATI	19840101 201001 2 003	PENGATUR	II/C	BENDAHARA PENGELUARAN	PNS
15	ERIK KISWANTO, S.STP	19851227 200417 1 001	PENATA	III/C	LURAH PURWAHARJA	PNS
16	SUBHAN HIDAYAT, S.SOS	19790113 201001 1 004	PENATA	III/C	SEKRETARIS KELURAHAN PURWAHARJA	PNS
17	SRI TINA NINGSIH, S.IP	19780626 200701 2 009	PENATA MUDA TK.I	III/B	KASI PEM. KEL. PURWAHARJA	PNS
18	IKAH SURTIKAH, S.IP	19670302 198803 2 009	PENATA	III/C	KASI KESMAS KEL. PURWAHARJA	PNS
19	YULI SUGIARTI, S.STP	19930725 201507 2 001	PENATA MUDA	III/A	KASI EKBANG KEL. PURWAHARJA	PNS
20	SUNIARTI	19710626 200901 2 001	PENGATUR	II/C	BENDAHARA PENGELUARAN KEL. PURWAHARJA	PNS
21	RIO SEROJA	19790908 200901 1 002	PENGATUR	II/C	PELAKSANA ADMINISTRASI DAN ARSIP SURAT KEL.PURWAHARJA	PNS
22	HERNIATI AISAH	198601232006022001	PENATA	III/C	LURAH KARANG PANIMBAL	PNS
23	NAOMI SARASWATI, SH	197910072010012001	PENATA MUDA TK.I	III/B	SEKRETARIS KELURAHAN KARANG PANIMBAL	PNS
24	SHELSA GIANTARI ARTOYO, S.STP	199208302014062001	PENATA MUDA TK.I	III/B	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEL. KARANG PANIMBAL	PNS
25	EUIS KARTIKA,SE	198202282010012001	PENATA MUDA TK.I	III/B	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KEL.KARANGPANIMBAL	PNS
26	ATIN ROHAYATI	19720616 200312 2 006	PENATA MUDA	III/A	KASI KESMAS KEL KARANG PANIMBAL	PNS
27	RIDWANSYAH, SE.	19810403 200312 1 004	PENATA MUDA	III/A	BENDAHARA KELURAHAN KARANGPANIMBAL	PNS
28	AAT SUPRIATNA				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT

29	INEU GINANJAR				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT
30	AGUSTIANA HERDIMAN				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT
31	YIYIN MUNDIRIN				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT
32	FENI NOVIA				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT
33	ADE SUPRIATNA				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT
34	ADE SUSENO				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT
35	GHALI DWIATSARI				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	PTT
36	NURHAYATI				PELAKSANA KEL PURWAHARJA	PTT
37	YUSUF MUNAWAR				PELAKSANA KEL PURWAHARJA	PTT
38	DUDI ISKANDAR				PELAKSANA KEL PURWAHARJA	PTT
39	M.FERRY SUTANTO				PELAKSANA KEL PURWAHARJA	PTT
40	UUS KUSWANDA				PELAKSANA KEL PURWAHARJA	PTT
41	ANEU HIDAWINARNI				PELAKSANA KEL PURWAHARJA	PTT
42	SUPRIANTO				PELAKSANA KEL PURWAHARJA	PTT
43	SUNARDI				PELAKSANA KEL KARANGPANIMBAL	PTT
44	TETI WIDARNI				PELAKSANA KEL KARANGPANIMBAL	PTT
45	ZENI IRWAN EFENDI				PELAKSANA KEL KARANGPANIMBAL	PTT
46	AYI SUPENDI				PELAKSANA KEL KARANGPANIMBAL	PTT
47	SITI RODIANTI				PELAKSANA KEL KARANGPANIMBAL	PTT
48	INTAN SUKANDAR				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	SUKWAN
49	DENI MUHAMMAD RIDWAN				PELAKSANA KEC. PURWAHARJA	SUKWAN

50	INDRI KUSHERMAWANDI				PELAKSANA KEL KARANGPANIMBAL	SUKWAN
51	RUDI SHALAM				PELAKSANA KEL KARANGPANIMBAL	SUKWAN

2.2.2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Purwaharja didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Purwaharja

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
1	Filing Besi/Metal	9	9	
2	Meja Biro	4	4	
3	Meja ½ Biro	4	4	
4	Lambang Garuda	1	1	
5	Tiang Bendera	1	1	
6	Rak Besi/Metal	1	1	
7	Papan Nama Intansi	1	1	
8	Lemari Kaca	1	1	
9	Lemari Kayu	12	9	3
10	Meja Kayu	14	8	6
11	Kursi Rapat/Kayu	20	9	11
12	Rak Kayu	1	1	
13	Meja Podium	2	1	1
14	Meja Rapat	4	2	2
15	Papan Pengumuman	1	1	
16	Sepeda Motor	10	9	1
17	Mobil	2	2	
18	Alat Pemetong Kertas	1	1	
19	Lemari Sorok	3	2	1
20	Kursi Keja/Kayu	3	3	
21	PC Unit	2	1	1
22	CPU	2		2
23	Monitor	2		2
24	Printer	10	3	7
25	Kursi Tamu	4	3	1
26	Kipas Angin	2	1	1
27	Televisi	3	1	2
28	SSB Portabel	1	1	
29	Kursi Rapat Besi	20	15	5
30	Kursi Putar	4	3	1
31	Lemari Es	1	1	
32	AC Unit	14	8	6
33	Dispenser	2	1	1
34	Kamera Electronic	1	1	

35	Pesawat Telepon	1	1	
36	Mesin Tik manual	3	1	2
37	Note Book	1	1	
38	Laptop	7	4	3
39	Meja Komputer	2	2	
40	Mesin Penghisap Debu	1	1	
41	Kursi Rapat Chitose	50	38	12
42	Sound Sistem	1	1	
43	Alat Penghancur Kertas	1	1	
44	Kursi Rapat Olympic	25	19	6
45	Kursi Rapat Kayu	20	9	11
46	Band Kas	1	1	
47	Scaner	1	1	
48	Mesin Faxsimile	1	1	
49	CCTV	1		1
50	Lemari Arsip Romaro	1	1	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwaharja

Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwaharja dapat dilihat dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Purwaharja sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwahrja
Kota Banjar (Tahun 2014-2018)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tertib administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan keuangan.				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase SOP yang diterapkan.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Persentase SPM yang diterapkan.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	IKM pelayanan publik di kecamatan				75	75,5	76	76,5	77	75	75,5	76	76,5	77	75	75,5	76	76,5	77

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Purwaharija
Kota Banjar (Tahun 2014-2018)

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rata-rata						
		ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.930.000	211.883.000	232.158.500	865.856.250	906.654.650	133.133.660	201.734.277	232.008.156	850.805.227	886.200.777	91,2	95,2	99,9	98,3	97,7	6.2	32.7
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.570.000	94.943.000	104.991.500	310.085.350	328.991.350	114.597.130	94.839.000	85.144.500	307.623.688	317.573.176	98,3	99,9	81,1	99,2	96,5	1.8	22.1
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.500.000	27.500.000	33.000.000	92.052.400	67.211.000	21.500.000	27.500.000	28.000.000	92.052.400	66.296.000	100	100	84,8	100	98,6	- 3.3	19.0
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	29.991.000	29.950.400	100	100	100	100	99,8	15.4	0
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	15.915.000	6.000.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	15.915.000	100	100	100	100	100	21.0	21.0
6.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	-	-	-	4.511.000	3.000.000	-	-	5.000.000	4.511.000	3.000.000				100	100		

7.	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	-	-	-	302.815.000	297.963.000	-	-	-	301.574.500	297.560.000				99,6	99,9			
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.000.000	27.000.000	11.700.000	33.581.500	33.081.500	14.000.000	26.999.500	17.605.000	33.581.500	33.081.500	100	100	150,5	100	100	-	15.2	15.2
9.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	26.486.000	28.346.000	-	-	-	26.450.000	28.310.000				99,9	99,9			
10.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	-	-	-	247.029.000	245.389.000	-	-	-	246.593.000	241.524.000				99,8	98,4			
11.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	-	-	-	29.631.000	32.070.000	-	-	-	29.577.000	31.778.000				99,8	99,1			
12.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	192.137.500	171.802.500	-	-	-	189.045.500	165.217.500				98,4	96,2			
13.	Prog pengembangan lingkungan sehat	-	-	-	30.228.000	30.664.000	-	-	-	29.798.000	30.134.000				98,6	98,3			
14.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	76.195.000	89.115.000	-	-	-	76.152.000	89.072.000				99,9	100,0			

15.	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	-	-	20.810.000	16.310.000	-	-	-	20.780.000	15.780.000				99,9	96,8		
-----	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------	------------	--	--	--	------	------	--	--

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purwaharja

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Purwaharja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah sangat beragam. Kecamatan Purwaharja harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelayanan Kepada Masyarakat.

Disamping itu hal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013, Kecamatan Purwaharja di peruntukan sebagai kawasan pemukiman, hutan produksi seluas kurang lebih 418,82 hektar, pergudangan, industri rumah tangga, pusat perbelanjaan modern sepanjang jalan Brigjen M. Isya, kompleks perkantoran, pariwisata yakni dengan adanya saat ini wana wisata Situ Mustika, pertanian seluas kurang lebih 62,71 hektar. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Kecamatan Purwaharja untuk menyiapkan diri dan memberdayakan masyarakat agar siap menjadi kawasan pendukung perekonomian di Kota Banjar. Hal ini pun tentu menjadi peluang bagi masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan usaha perekonomian dan meningkatkan kesejahteraanya.

Dalam upaya peningkatan pembangunan di desa maupun di kelurahan, dengan adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka hal ini menjadi tantangan baik untuk aparat di desa/kelurahan maupun masyarakatnya untuk siap secara kompetensi untuk menjalankan peraturan tersebut karena pemerintah memberikan kesempatan kepada desa dan kelurahan untuk mampu membangun dan memajukan desa dan kelurahannya. Hal ini pun tentu menjadi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memiliki peran yang nyata dalam mewujudkan pembangunan di desa maupun di kelurahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PURWAHARJA

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Purwaharja sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Purwaharja

Beberapa permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Purwaharja sehingga belum terwujudnya secara optimal program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih rendahnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Belum memadainya kualitas sumber daya aparatur	Masih rendahnya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.	Belum terwujudnya pelayanan publik yang prima	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Masih terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana di Kecamatan
3.	Belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam hidup ber-PHBS	Masih terbatasnya kegiatan penyuluhan masyarakat tentang PHBS
4.	Belum optimalnya kualitas infrastruktur dan lingkungan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur skala lokal di kelurahan
5.	Minimnya kegiatan di bidang ekonomi	Belum optimalnya kegiatan pengembangan potensi ekonomi	Masih minimnya event-event di bidang perekonomian

6.	Minimnya kegiatan di bidang budaya	Belum optimalnya kegiatan pengembangan budaya yang ada	Masih minimnya event-event di bidang kebudayaan
7.	Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan bidang kepemudaan	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam lembaga kepemudaan	Masih minimnya kegiatan yang melibatkan partisipasi pemuda

5.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwaharja sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Banjar sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018 – 2023.

Visi Kota Banjar :

**“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya
Menuju Banjar Agropolitan”**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2018-2023.

Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah: “Banjar Semakin Berseri”. Kata “Berseri” pada slogan tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok

Visi, yaitu: BERSIH, SEJAHTERA, dan ASRI. Berikut adalah penjelasan dari visi tersebut:

1. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
3. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

4. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah.
5. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

Misi Kota Banjar :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, premanisme dan ancaman dari luar merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Purwaharja. Hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke-1 ini yaitu dalam rangka menciptakan Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya *good governance* dan *clean government*".

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Kecamatan Purwaharja dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah sehingga pelayanan prima di Kota Banjar benar-benar terwujud.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai *a process of enlarging people's choice* atau proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1) usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai; dan (3) standar hidup yang layak. Tingkat keberhasilan dalam pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan. Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan

peningkatan daya beli masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Kota Banjar agar menjadi masyarakat yang mau berpartisipasi, bekerja sama dan menjaga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala potensi untuk mewujudkan segala cita-cita.

3. **Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak mengesampingkan pemerataan pembangunannya merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih memungkinkan bagi Kota Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang berkualitas, mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan faktor *networking* akan mampu menghasilkan bentuk nilai tambah ekonomi yang besar.

Networking yang dimaksudkan terutama untuk memanfaatkan potensi ekonomi daerah sekitar untuk memproduksi barang dan jasa lain yang nilai tambahnya meresap di Kota Banjar ditambah kebijakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip keadilan dimana pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada posisi yang sama.

4. **Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)**

Tujuan dan sasaran dari misi keempat tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan1. :Mewujudkan Banjar Kota Peduli HAM

Sasaran 1.1. :Terwujudnya Banjar sebagai Kota Layak Anak

Sasaran1.2. :Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat

Sasaran 1.3. :Terwujudnya Banjar sebagai Kota Responsif Gender

5. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan**

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan. Istilah berkelanjutan digunakan untuk konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.

6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

Tujuan dan sasaran dari misi keenam tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. : Menjadikan Kota Banjar sebagai daerah tujuan wisata

Sasaran 1.1. :Meningkatnya aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga

Sasaran 1.2. : Meningkatkan potensi Daerah berbasis Agropolitan

Tugas dan fungsi kecamatan Purwahaerja berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Banjar, dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik;
3. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
4. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, pemeliharaan sarana dan pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebulan lain dan/ atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
5. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
6. Pembinaan aparatur sipil negara pada kecamatan dan kelurahan.

Adapun faktor-faktor penghambat yang ada di Kecamatan Purwahaerja dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah tersebut diantaranya :

1. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
2. Belum memadainya sebagian tingkat pendidikan aparatur kecamatan;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Belum optimalnya kualitas infrastruktur dan lingkungan;
5. Belum optimalnya kegiatan pengembangan potensi ekonomi

6. Minimnya kegiatan di bidang budaya;
7. Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan bidang kepemudaan.

Sedangkan faktor-faktor pendukung yang ada di Kecamatan Purwahrja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah diantaranya :

1. Adanya program peningkatan sumber daya aparatur;
2. Adanya kebijakan keuangan daerah dalam program pendidikan untuk aparatur;
3. Adanya program dan kegiatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat;
4. Adanya kebijakan keuangan daerah untuk pembangunan infrastruktur di kecamatan/kelurahan;
5. Adanya program dan kegiatan untuk peningkatan potensi ekonomi;
6. Adanya program dan kegiatan untuk pengelolaan kekayaan budaya;
7. Adanya program peningkatan peran serta kepemudaan.

5.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013, Kecamatan Purwahrja di peruntukan sebagai kawasan pemukiman, hutan produksi seluas kurang lebih 418,82 hektar, pergudangan, industri rumah tangga, pusat perbelanjaan modern sepanjang jalan Brigjen M. Isya, kompleks perkantoran, pariwisata yakni dengan adanya saat ini wana wisata Situ Mustika, pertanian seluas kurang lebih 62,71 hektar.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Purwahrja ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut antara lain :

1. Adanya dampak menurunnya kualitas lingkungan akibat pembangunan perumahan dengan bertambahnya volume sampah jika tidak dikelola dengan baik;
2. Adanya pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang tidak dikelola dengan baik;
3. Adanya dampak menurunnya daya saing pasar tradisional dengan adanya pusat perbelanjaan modern;

Sedangkan faktor-faktor pendukung yang ada di Kecamatan Purwahrja terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut antara lain :

1. Adanya lahan kurang produktif yang dapat dijadikan kawasan pemukiman;
2. Adanya kawasan hutan yang dapat dikelola dengan baik;
3. Adanya industri-industri rumah tangga yang dapat dijadikan sentra produk unggulan Kota Banjar;

4. Letak Kecamatan Purwahaerja yang strategis sebagai pusat perbelanjaan, karena sebagai pintu gerbang Kota Banjar yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah;
5. Letak Kecamatan Purwahaerja yang strategis sebagai pusat pemerintahan Kota Banjar;
6. Adanya lokasi wisata yang berpotensi sebagai daya tarik wisata Kota Banjar, diantaranya Situ Mustika, Rawa Onom, Situs Pulo Majeti dsb;
7. Adanya lahan pertanian produktif untuk mendukung Banjar Agropolitan.

5.3. Penentuan Isu Isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan Kecamatan Purwahaerja, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kecamatan Purwahaerja bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan di kecamatan;
4. Peningkatkan aktivitas di bidang ekonomi, budaya dan kepemudaan di kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintahan Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Tahun 2019-2023 adalah :

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Purwaharja;
6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan Lingkungan pemukiman di Kecamatan;
8. Meningkatkan aktivitas ekonomi, budaya dan kepemudaan di kecamatan.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kota Banjar/Kecamatan Purwaharja yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Kecamatan Purwaharja.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwaharja Tahun 2019-2023 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya kualitas kesehatan;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman penduduk;
5. Meningkatnya event di bidang Ekonomi.
6. Meningkatnya event di bidang kebudayaan;
7. Meningkatnya peran serta pemuda dalam keorganisasian pemuda;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwaharja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Purwaharja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan							
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai AKIP	65	69	73	77	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan	75	76	77	78	79
2.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat							
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase cakupan PHBS	60	60	65	65	70
3.	Mewujudkan lingkungan yang sehat dan indah							
		Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman penduduk	Persentase infrastruktur skala kelurahan yang baik	-	50	55	60	65
4.	Meningkatkan aktivitas di bidang ekonomi, budaya dan kepemudaan di kecamatan							

		Terselenggaranya event di bidang ekonomi	Jumlah event di bidang ekonomi	1	1	1	1	1
		Terselenggaranya event di bidang budaya	Jumlah event di bidang budaya	2	2	2	2	2
		Terselenggaranya kegiatan di bidang kepemudaan	Jumlah event di bidang kepemudaan	-	2	2	2	2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan di Kecamatan Purwaharja. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang ada di Kecamatan Purwaharja.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Purwaharja dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat diuraikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Purwaharja 5 (lima) tahun ke depan pada tabel berikut :

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>ISU STRATEGIS :</p> <p>9. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Purwaharja; 10. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan di kecamatan; 11. Perwujudan kecamatan peduli HAM; 12. Peningkatkan aktivitas di bidang ekonomi, budaya dan olah raga di kecamatan.</p>			
<p>VISI : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan</p>			
<p>MISI I : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen rencana kinerja dan keuangan yang akuntabel 2. Pendampingan APBDes, pembinaan terhadap kinerja desa/kelurahan 3. Penjaringan aspirasi dan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Pembinaan dan pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Penyeragaman performance aparatur 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non formal 5. Penyelenggaraan lomba

		aparatur 6. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 7. pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	desa/kelurahan 6. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal 7. Pembinaan anggota linmas
MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Pengembangan lingkungan sehat	1. Pembinaan keluarga masyarakat peduli KB 2. Fasilitasi pembinaan kelompok bina keluarga 3. Pembinaan terhadap kader PKK 4. Penyuluhan lingkungan sehat
MISI V : Meningkatkan Kualitas Lingkungan			
Meningkatkan kualitas Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman penduduk	1. Pengembangan lingkungan perumahan sehat 2. Pengembangan perumahan	1. Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2. Pembuatan/perbaikan infrastruktur skala kelurahan
MISI VI : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.			
Meningkatkan aktivitas di bidang ekonomi, budaya dan kepemudaan di kecamatan	Terselenggaranya event di bidang ekonomi	1. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1. Fasilitasi Hari Krida Pertanian
	Terselenggaranya event di bidang budaya	1. Pengelolaan kekayaan budaya	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya melalui event-event kebudayaan
	Terselenggaranya event di bidang kepemudaan	1. Peningkatan peran serta kepemudaan	1. Pembinaan organisasi kepemudaan

Dari tabel tersebut di atas, dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara visi dan misi kepala daerah pada RPJMD Kota Banjar 2019-2023 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Purwahaerja.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Purwaharja guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Purwaharja untuk Periode Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 6.1
Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Purwaharja
Periode Tahun 2018-2023

M I S I K E	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kod e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaia n pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Kec		Unit Kerja Pena nggu ng jawab	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Targ et	Rp		
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
M I S I 1	Meningkat an kualitas tata kelola pemerintah dan kecamatan	Meningkat nya akuntabilit as kinerja dan keuangan	Nilai AKIP					65		69		73		77		81		81			
				1	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :	Nilai AKIP		65	15.915	69	13.815	73	13.900	77	13.900	81	13.900	81	13.900	Kec. Purwa harja	
					1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumah dokumenlapor an capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1	3.615	1	3.615	1	3.700	1	3.700	1	3.700	1	3.700	Kec. Purwa harja
					2	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD		1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	Kec. Purwa harja
					3	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD		1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	Kec. Purwa harja
					4	Penyusunan perencanaan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD		1	4.200	1	4.200	1	4.200	1	4.200	1	4.200	1	4.200	Kec. Purwa harja
					5	Penyusunan renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra SKPD		1	2.100											Kec. Purwa harja

				2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai AKIP		65	37.565	69	52.565	73	53.500	77	53.500	81	53.500	81	53.500	Kec. Purwaraja
				1	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kecamatan	Persentase realisasi pembayaran PBB se-Kecamatan		80	5.000	85	10.000	86	10.000	87	10.000	88	10.000	88	10.000	Kec. Purwaraja
				2	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Tingkat kel purwaraja	Persentase realisasi pembayaran PBB kel Purwaraja		75	14.551	77	14.551	78	15.000	79	15.000	80	15.000	80	15.000	Kec. Purwaraja
				3	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Tingkat kel karangpanimbal	Persentase realisasi pembayaran PBB Kel Karangpanimbal		85	8.014	86	8.014	87	8.500	88	8.500	90	8.500	90	8.500	Kec. Purwaraja
				4	Pendampingan dan verifikasi APBDes	Presentase realisasi APBDes		80	5.000	85	10.000	85	10.000	85	10.000	85	10.000	85	10.000	Kec. Purwaraja
				5	Monitoring evaluasi kinerja desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi		4	5.000	4	10.000	4	10.000	4	10.000	4	10.000	4	10.000	Kec. Purwaraja

				3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan yang direalisasi		30%	105.645	35%	126.000	40%	126.500	40%	126.500	40%	126.500	40%	126.500	Kec. Purwaharja
				1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat kelurahan purwaharja	Jumlah Kegiatan LPM Kel Purwaharja		12	24.000	12	24.000	12	24.000	12	24.000	12	24.000	12	24.000	Kec. Purwaharja
				2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat kelurahan karangpanimbal	Jumlah Kegiatan LPM Kel Karangpanimbal		12	28.511	12	39.000	12	39.000	12	39.000	12	39.000	12	39.000	Kec. Purwaharja
				3	Penjaringan aspirasi dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Cakupan realisasi usulan musrenbang Tingkat Kecamatan		30%	17.500	35%	17.500	37%	17.500	38%	17.500	39%	17.500	40%	17.500	Kec. Purwaharja
				4	Penjaringan aspirasi dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan purwaharja	Cakupan realisasi usulan musrenbang Tingkat Kelurahan Purwaharja		30%	12.500	35%	22.000	37%	22.000	38%	22.000	39%	22.000	40%	22.000	Kec. Purwaharja
				5	Penjaringan aspirasi dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan karangpanimbal	Cakupan realisasi usulan musrenbang Tingkat Kelurahan KarangPanimbal		30%	23.134	35%	23.500	37%	24.000	38%	24.000	39%	24.000	40%	24.000	Kec. Purwaharja

MI SI 1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan				75		76		77		78		79		79				
				4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan	75	977.829	76	##### ##	77	1.080.000	78	1.081.000	79	##### ##	79	1.081.000			Kec. Purwaraja
				1	Penyediaan jasa surat menyurat	persentase pemenuhan surat menyurat	100 %	9.699	100 %	9.699	100 %	10.000	100 %	10.000	100 %	10.000	100 %	10.000			Kec. Purwaraja
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemakaian air dan listrik yang dibayar	12	83.401	12	93.401	12	85.000	12	85.000	12	85.000	12	85.000			Kec. Purwaraja
				3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak	8	18.898	8	18.898	8	19.000	8	19.000	8	19.000	8	19.000			Kec. Purwaraja
				4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang baik	3	7.550	4	7.550	4	8.000	5	8.000	5	8.000	5	8.000			Kec. Purwaraja
				5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di kantor	2	41.600	2	41.600	2	42.000	2	42.000	2	42.000	2	42.000			Kec. Purwaraja
				6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase jumlah peralatan kerja yang baik	70%	5.000													Kec. Purwaraja
				7	Penyediaan alat tulis kantor	persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	100 %	85.285	100 %	89.000	100 %	90.000	100 %	90.000	100 %	90.000	100 %	90.000			Kec. Purwaraja

					8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100 %	99.277	100 %	102.000	100 %	102.000	100 %	102.000	100 %	102.000	100 %	102.000	Kec. Purwa harja		
					9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100 %	22.840	100 %	22.840	100 %	23.000	100 %	23.000	100 %	23.000	100 %	23.000	100 %	23.000	Kec. Purwa harja
					10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase pemenuhan Penyediaan peralatan rumah tangga		100 %	20.307	100 %	20.307	100 %	21.000	100 %	21.000	100 %	21.000	100 %	21.000	100 %	21.000	Kec. Purwa harja
					11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100 %	16.920	100 %	16.920	100 %	17.000	100 %	17.000	100 %	17.000	100 %	17.000	100 %	17.000	Kec. Purwa harja
					12	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Penyediaan makanan dan minuman		100 %	126.462	100 %	136.462	100 %	137.000	100 %	137.000	100 %	137.000	100 %	137.000	100 %	137.000	Kec. Purwa harja
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Presentase Jumlah rapat ke luar daerah yang diikuti		80%	101.200	80%	113.000	85%	114.000	85%	115.000	85%	115.000	85%	115.000	85%	115.000	Kec. Purwa harja
					14	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	Persentase Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang diberi honor		100 %	287.762	100 %	359.276	100 %	360.000	100 %	360.000	100 %	360.000	100 %	360.000	100 %	360.000	Kec. Purwa harja
					15	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Persentase Penyediaan jasa pengamanan kantor		100 %	42.628	100 %	43.000	100 %	43.000	100 %	43.000	100 %	43.000	100 %	43.000	100 %	43.000	Kec. Purwa harja

					1 6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Presentase Jumlah rapat dalam daerah yang diikuti		90%	9.000	90%	9.000	95%	9.000	100 %	9.000	100 %	9.000	100 %	9.000	Kec. Purwa harja
					5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana kantor yang baik		70%	364.165	75%	399.500	80%	413.000	85%	423.000	90%	433.000	90%	433.000	Kec. Purwa harja
					1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang baik		70%	124.850	75%	135.000	80%	150.000	85%	160.000	90%	170.000	90%	170.000	Kec. Purwa harja
					2	Pemeliharaan rutin/gedung kantor	Persentase jumlah ruangan dalam kondisi baik		70%	65.783	75%	81.500	75%	80.000	75%	80.000	80%	80.000	80%	80.000	Kec. Purwa harja
					3	Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/operasional	Persentase jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik		50%	161.832	60%	162.000	65%	162.000	65%	162.000	70%	162.000	70%	162.000	Kec. Purwa harja
					4	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang baik		70%	11.700	80%	21.000	80%	21.000	85%	21.000	86%	21.000	86%	21.000	Kec. Purwa harja
					6	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase pegawai yang berdisiplin pakaian		70%	64.650	75%	38.000	80%	48.000	85%	38.000	90%	48.000	90%	48.000	Kec. Purwa harja
					1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan pegawai berpakaian dinas yang baik		70%	19.950	75%	20.000	80%	20.000	85%	20.000	90%	20.000	90%	20.000	Kec. Purwa harja
					2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Cakupan pegawai berpakaian khusus hari tertentu yang baik		70%	36.000	75%	18.000	80%	18.000	85%	18.000	90%	18.000	90%	18.000	Kec. Purwa harja

				3	Pengadaan pakaian korpri	Cakupan pegawai berpakaian korpri yang baik		70%	8.700			80%	10.000			90%	10.000	90%	10.000	Kec. Purwa harja
				7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan lembaga masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal		75%	35.000	75%	35.000	80%	35.000	85%	35.000	85%	35.000	85%	35.000	Kec. Purwa harja
				1	Pendidikan dan pelatihan non formal	Cakupan lembaga masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal		75%	35.000	75%	35.000	80%	35.000	85%	35.000	85%	35.000	85%	35.000	Kec. Purwa harja
				8	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	persentase desa/kel dengan tingkat perkembangan desa yang cepat berkembang		25%	5.000	25%	10.000	25%	10.000	50%	10.000	50%	10.000	50%	10.000	Kec. Purwa harja
				1	Lomba Desa/kelurahan tk. Kecamatan	persentase desa/kel dengan tingkat perkembangan desa yang cepat berkembang		25%	5.000	25%	10.000	25%	10.000	50%	10.000	50%	10.000	50%	10.000	Kec. Purwa harja
				9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah dokumen profil kecamatan yang tersusun		1	308.650	1	318.980	1	319.000	1	319.000	1	319.000	1	319.000	Kec. Purwa harja
				1	Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat kelurahan purwaharja	Jumlah dokumen profil Kelurahan Purwaharja yang tersusun		1	183.980	1	183.980	1	184.000	1	184.000	1	184.000	1	184.000	Kec. Purwa harja

					2	Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat kelurahan Karangpanimbal	Jumlah pdokumen profil Kelurahan Karangpanimbal yang tersusun		1	124.670	1	135.000	1	135.000	1	135.000	1	135.000	Kec. Purwaharja		
				10	Program pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	Cakupan partisipasi linmas dalam keamanan dan ketertiban se-kecamatan		70%	19.283	75%	49.000	75%	49.000	80%	49.000	85%	49.000	85%	49.000	Kec. Purwaharja	
					1	Peningkatan kemandirian dan ketertiban berbasis masyarakat tingkat Kel Purwaharja	Cakupan partisipasi anggota linmas dalam keamanan dan ketertiban Kel Purwaharja		70%	7.700	75%	24.000	75%	24.000	80%	24.000	85%	24.000	85%	24.000	Kec. Purwaharja
					2	Peningkatan kemandirian dan ketertiban berbasis masyarakat tingkat Kel Karangpanimbal	Cakupan partisipasi anggota linmas dalam keamanan dan ketertiban Kel Karangpanimbal		70%	11.583	75%	25.000	75%	25.000	80%	25.000	85%	25.000	85%	25.000	Kec. Purwaharja
MI SI 2	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kualitas kesehatan	Persentase cakupan PHBS di masyarakat se-kecamatan					70%		70%		75%		75%		80%		80%			
				11	Program Pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Jumlah PUS ber KB se-Kecamatan		70%	249.995	70%	256.620	75%	257.000	75%	257.000	80%	257.000	80%	257.000	Kec. Purwaharja	

					1	Pembinaan Kel masyarakat peduli KB (Insentif Kader) tingkat kel purwahaarja	persentase Jumlah PUS ber KB Kel Purwahaarja		70%	136.620	70%	136.620	75%	137.000	75%	137.000	80%	137.000	80%	137.000	Kec. Purwa harja
					2	Pembinaan Kel masyarakat peduli KB (Insentif Kader) tingkat kel karangpanimbal	persentase Jumlah PUS ber KB Kel Karangpanimbal		70%	113.375	70%	120.000	75%	120.000	75%	120.000	80%	120.000	80%	120.000	Kec. Purwa harja
					12	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Jumlah BKB/BKR/BKL yang dibina se-Kecamatan		70%	187.836	70%	205.500	75%	206.000	75%	206.000	80%	206.000	80%	206.000	Kec. Purwa harja
					1	Fasilitasi pembinaan kelompok bina keluarga tk. Kel Purwa	persentase Jumlah BKB/BKR/BKL yang dibina Kel Purwahaarja		70%	19.500	70%	19.500	75%	20.000	75%	20.000	80%	20.000	80%	20.000	Kec. Purwa harja
					2	Fasilitasi pembinaan kelompok bina keluarga tk. Kel karpn	persentase Jumlah BKB/BKR/BKL yang dibina Kel Karangpanimbal		70%	17.596	70%	21.000	75%	21.000	75%	21.000	80%	21.000	80%	21.000	Kec. Purwa harja
					3	Pembinaan terhadap kader PKK tingkat kecamatan	Cakupan realisasi 10 program pokok PKK se-Kecamatan		70%	30.000	75%	30.000	75%	30.000	80%	30.000	80%	30.000	80%	30.000	Kec. Purwa harja
					4	Pembinaan terhadap kader PKK tingkat kelurahan purwa	Cakupan realisasi 10 program pokok PKK Kel Purwahaarja		70%	61.000	75%	61.000	75%	61.000	80%	61.000	80%	61.000	80%	61.000	Kec. Purwa harja

				5	Pembinaan terhadap kader PKK tingkat kelurahan karpan	Cakupan realisasi 10 program pokok PKK Kel Karangpanimbal		70%	59.740	75%	74.000	75%	74.000	80%	74.000	80%	74.000	80%	74.000	Kec. Purwaharja
				13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase cakupan PHBS di masyarakat se-kecamatan		60%	36.740	60%	43.000	65%	43.000	65%	43.000	70%	43.000	70%	43.000	Kec. Purwaharja
				1	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat tingkat kelurahan purwaharja	Persentase cakupan PHBS di masyarakat Kel Purwaharja		60%	22.000	60%	22.000	65%	22.000	65%	22.000	70%	22.000	70%	22.000	Kec. Purwaharja
				2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat tingkat kelurahan karangpanimbal	Persentase cakupan PHBS di masyarakat Kel Karangpanimbal		60%	14.740	60%	21.000	65%	21.000	65%	21.000	70%	21.000	70%	21.000	Kec. Purwaharja
MI SI 5	Mewujudkan lingkungan yang sehat dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman penduduk	Persentase infrastruktur kelurahan yang baik se-kecamatan							50%		55%		60%		65%		65%		
				14	Program lingkungan Perumahan sehat	Persentase jumlah Rumah Tangga bersanitasi se-Kecamatan			-	50%	600.000	55%	600.000	60%	600.000	65%	600.000	65%	600.000	Kec. Purwaharja
				1	penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kel Purwaharja	Persentase jumlah Rumah Tangga bersanitasi Kel Purwaharja				50%	300.000	55%	300.000	60%	300.000	65%	300.000	65%	300.000	Kec. Purwaharja

				2	penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kel Karangpanimbal	Persentase jumlah Rumah Tangga bersanitasi Kel Karangpanimbal			50%	300.000	55%	300.000	60%	300.000	65%	300.000	65%	300.000	Kec. Purwarharja	
				15	program pengembangan perumahan	Persentase insfrastruktur kelurahan yang baik se-kecamatan		-	50%	1.250.000	55%	1.250.000	60%	1.250.000	65%	1.250.000	65%	1.250.000	Kec. Purwarharja	
				1	pembuatan/perbaikan infrastruktur skala kelurahan purwarharja	persentase infrastruktur kelurahan yang baik Kel Purwarharja			50%	600.000	55%	600.000	60%	600.000	65%	600.000	65%	600.000	Kec. Purwarharja	
				2	pembuatan/perbaikan infrastruktur skala kelurahan karangpanimbal	persentase infrastruktur kelurahan yang baik Kel Karangpanimbal			50%	650.000	55%	650.000	60%	650.000	65%	650.000	65%	650.000	Kec. Purwarharja	
MI SI 6	Meningkatkan aktivitas di bidang ekonomi, budaya dan kepemudaan	Meningkatkannya aktivitas di bidang ekonomi	Jumlah event di bidang ekonomi				1		1		1		1		1		1			
				16	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah event pameran hasil produk pertanian se-Kecamatan		1	37.208	1	55.000	1	55.000	1	55.000	1	55.000	1	55.000	Kec. Purwarharja
				1	Fasilitasi kegiatan Hari Krida Pertanian Tingkat Kelurahan purwarharja	Jumlah event pameran hasil produk pertanian Kel Purwarharja		1	16.550	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	Kec. Purwarharja

					2	Fasilitasi kegiatan Hari Krida Pertanian Tingkat Kelurahan Karangpanimbal	Jumlah event pameran hasil produk pertanian Kel Karangpanimbal		1	20.658	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	Kec. Purwaharja		
MI SI 6	Meningkatkan aktivitas di bidang ekonomi, budaya dan kepemudaan	Meningkatnya aktivitas di bidang budaya	Jumlah event di bidang budaya						2		2		2		2		2		2				
				17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah event di bidang budaya se-kecamatan		2	46.838	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	65.000	Kec. Purwaharja	
					1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya tingkat kel purwaharja	Jumlah event di bidang budaya Kel Purwaharja		2	21.800	2	35.000	2	35.000	2	35.000	2	35.000	2	35.000	2	35.000	Kec. Purwaharja
					2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya tingkat kel karangpanimbal	Jumlah event di bidang budaya Kel Karangpanimbal		2	25.038	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	Kec. Purwaharja
MI SI 6	Meningkatkan aktivitas di bidang ekonomi, budaya dan kepemudaan	Meningkatnya aktivitas di bidang kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan bidang kepemudaan							2		2		2		2		2		2			

				18	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan bidang kepemudaan se-Kecamatan			-	2	47.000	2	58.000	2	63.000	2	63.000	2	63.000	Kec. Purwaharja
				1	pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan bidang kepemudaan Tingkat Kecamatan Purwaharja				0	0	2	10.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	Kec. Purwaharja
				2	pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kel purwaharja	Jumlah kegiatan pembinaan bidang kepemudaan Kel Purwaharja				2	23.500	2	24.000	2	24.000	2	24.000	2	24.000	Kec. Purwaharja
				3	pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kel karangpanimbal	Jumlah kegiatan pembinaan bidang kepemudaan Kel Karangpanimbal				2	23.500	2	24.000	2	24.000	2	24.000	2	24.000	Kec. Purwaharja
JUMLAH											2.492.318		4.647.933		4.681.900		4.687.900		4.707.900	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan diKecamatan Purwahaerja Kota Banjar yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung RPJMD Kota Banjar tahun 2018-2023 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Purwahaerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2013

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Nilai AKIP	B	65	69	73	77	81	81
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public di Kecamatan	75	75	76	77	78	79	79
3	Persentase cakupan PHBS		60	60	65	65	70	70
4	Persentase infrastruktur skala kelurahan yang baik		-	50	55	60	65	65
5	Jumlah event di bidang ekonomi		1	1	1	1	1	1
6	Jumlah event di bidang budaya		2	2	2	2	2	2
7	Jumlah event di bidang kepemudaan		-	2	2	2	2	2

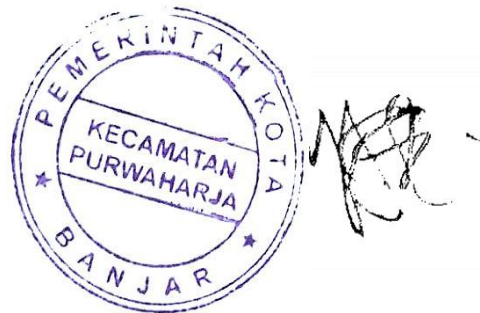
BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Purwaharja merupakan dokumen yang disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Banjar Tahun 2019-2023. Sehubungan hal tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah maupun swasta dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Hal ini karena tentunya dibutuhkan sinergitas, konsistensi dan komitmen dari semua pihak untuk mendukung Kecamatan Purwaharja yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Purwaharja Tahun 2019-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kota Banjar Tahun 2019-2023 yakni mewujudkan Kota Banjar yang "BERSERI", BERSih pemerintahannya, Sejahtera masyarakatnya, dan asRI lingkungannya.

Purwaharja, Januari 2020
CAMAT PURWAHARJA,



Drs. WAWAN HERNAWAN, M.Si
NIP 19660512 198603 1 012

